



**Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan Upah Minimum
Kota (UMK)**

Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata 1 Departermen Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Penyusun

Nama : Bayu Herlyansyah

NIM : 14020114140102

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Bayu Herlyansyah
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14020114140102
3. Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Juli 1996
4. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik
5. Alamat : Taman Alamanda 2 blok EE3 No. 11 RT/RW 008/010 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi 17157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) yang saya tulis berjudul :

Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab.

Semarang, 20 Februari 2021

Pembuat Pernyataan;

Bayu Herlyansyah
NIM. 14020114140102

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)
Nama Penyusun : Bayu Herlyansyah
NIM : 14020114140102
Program Studi : Administrasi Publik

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 19640827 199001 1 001

Semarang, 20 Februari 2021
Wakil Dekan I



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 19690822 199403 1 003

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Budi Puspo P, M.Hum



(.....)

Dosen Pengaji Skripsi :

1. Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si.
2. Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si



(.....)



(.....)

HALAMAN MOTTO

My dad said

“ kalo kamu hari ini tidak berjalan, maka kamu besok harus siap untuk berlari.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyusunan, khususnya untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Sarjuni dan ibu Surini yang selalu mendoakan dan berjuang untuk masa depan anak anaknya, menjadi motivator dan juga memberi kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Riza aukta Nugraha, Achmad Nur Fauzi, Nina Wahyuni, Dwi Handyan, Galih Adi Luhung, Benny Kurnia Pratama terima kasih juga sudah memberikan nasihat untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi

Dan yang terakhir untuk sahabat dan teman teman saya terutama keluarga AWB squad, Keluarga Tulip77, Geng Para Pecinta Laras

JUDUL	: Peran Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK)
NAMA	: Bayu Herlyansyah
NIM	: 14020114140102

ABSTRAK

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di Indonesia salah satu bentuk peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan berada dibawah naungan Kementerian yang disebut sebagai Kemnaker (Kementerian Tenaga Kerja). Kementerian Tenaga Kerja mempunyai peran untuk mengatur segala urusan ketenagakerjaan. Sebagai aparatur penyelenggara negara yang bertugas melayani warga negara Kementerian Tenaga Kerja dibantu pelaksanaan tugasnya oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja. Dinas tenaga kerja merupakan Lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi dalam pembinaan, pengendalian terhadap hak & kewajiban serta pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Upah merupakan hak yang harus ditunaikan penyedia lapangan kerja kepada tenaga kerja setelah melaksakan kewajibannya sebagai tenaga kerja.

Hasil dari pembahasan Peran Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK) Kota Bekasi dapat dikategorikan baik dengan adanya peranan yang diberikan Dinas tenaga kerja Kota Bekasi. Peran yang dilakukan Dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Selain itu Dinas tenaga kerja Kota Bekasi juga mengambil peran dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Dinas tenaga kerja Kota Bekasi telah menjalankan perannya dengan baik dalam proses penetapan upah minimum Kota (UMK) Kota Bekasi, namun diharapkan Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dapat meningkatkan lagi perannya dengan menngadakan evaluasi, hal ini dilakukan agar kedepan setiap tahunnya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di tahun sebelumnya.

Kata kunci : Peran pemerintah, Penetapan Upah minimum

TITLE	: Peran Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK)
NAME	: Bayu Herlyansyah
NIM	: 14020114140102

ABSTRACT

Manpower is everything that is related to labor before, during, and after the working period. In Indonesia, one form of the government's role in the manpower sector is under the auspices of the Ministry of Manpower. As a state apparatus in charge of serving citizens, the Ministry of Manpower is assisted in carrying out its duties by the local government, especially the Manpower Office. The manpower office is a government institution that has functions in fostering, controlling rights & obligations as well as supervision in the manpower sector. Wages are a right that must be fulfilled by job providers to workers after carrying out their obligations as workers.

The results of the discussion of the role of the Bekasi City Manpower Office in determining the city minimum wage (UMK) for the city of Bekasi can be categorized as good due to the role given by the Bekasi City Manpower Office. The role played by the Bekasi City Manpower Office is as a facilitator, regulator and catalyst. In addition, the Bekasi City Manpower Office also plays a role in creating a harmonious relationship between workers and employers.

Conclusion The Bekasi City Manpower Office has carried out its role well in the process of determining the city minimum wage (UMK) for the city of Bekasi, but it is hoped that the Bekasi City Manpower Office can increase its role again by conducting an evaluation, this is done so that in the future every year it can minimize mistakes that had happened in the previous year.

Keywords: Role of government, determination of minimum wages

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK) Kota Bekasi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Pada proses penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Dekan FISIP Undip beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. A.P. Tri Yuniningsih, M. Si selaku Ketua Departemen Administrasi Publik.
3. Ibu Dra. Maesaroh M. Si. Selaku Kepala Prodi S1 Administrasi Publik.
4. Ibu Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si. selaku dosen wali
5. Bapak Dr. Budi Puspo P, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing penulisan skripsi ini sampai selesai.
6. Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si selaku dosen pengaji yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Departemen Administrasi Publik yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
8. Kantor Dinas tenaga kerja Kota Bekasi atas segala kebaikan dan keramahannya serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna keperluan pengambilan data pada penulis skripsi ini.
9. Kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bekasi atas segala kebaikan dan keramahannya serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna keperluan pengambilan data pada penulis skripsi ini.
10. Kantor Asosiasi pengusaha Indonesia Kota Bekasi atas segala kebaikan dan keramahannya serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna keperluan pengambilan data pada penulis skripsi ini.
11. Orang tua penulis, Bapak Sarjuni dan Surini atas segala doa dan dukungan moral maupun materi yang diberikan pada penulis dari lahir hingga saat ini.
12. Adik kandung, Riza Aukta Nugraha yang selalu memberi *support* dan menjadi penghibur dikala lara.
13. Kepada keluarga besar AwB Community (Galih, Anggit, Benny, Novrinaldi, Arga, Fajar, Ian, Jordi, Naufal, Genggi, Ori, Novan, Bahtiar, Revan, Fazizi, Chandra, Fahmi) yang selalu mendukung.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI).....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN MOTTO.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Teori.....	14
1.5.1 Pengertian Administrasi publik.....	14
1.5.2 Peran.....	16
1.5.3 Peran Pemerintah.....	19
1.6 Penelitian Terdahulu.....	21
1.7 Operasionalisasi konsep.....	23
1.8 Metode Penelitian.....	25
1.8.1 Tipe Penelitian.....	27
1.8.2 Fokus dan Lokus.....	28
1.8.3 Populasi Sampel.....	29
1.8.4 Jenis Data.....	30

1.8.5 Sumber Data.....	31
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data.....	32
1.8.8 Kualitas Data.....	34
BAB II GAMBARAN UMUM.....	36
2.1 Dinas tenaga kerja Kota Bekasi.....	36
2.1.1 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.....	36
2.1.2 Visi Misi.....	38
2.1.3 Struktur Organisasi DISNAKER Kota Bekasi	49
2.2 Lembaga Kerja Sama Tripartit	40
2.3 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi.....	41
2.3.1 Sejarah dan Hakikat APINDO.....	41
2.3.2 Visi dan Misi.....	41
2.3.3 Struktur Organisasi APINDO.....	42
2.4 Serikat Pekerja Kota Bekasi.....	43
2.4.1 Visi dan Misi.....	43
2.5 LKS Tripartit antara Pemerintah, Serikat Pekerja , dan Apindo terkait perumusan Upah Minimum Kota	44
BAB III HASIL PENELITIAN.....	46
3.1 Deskripsi Informan.....	47

3.2 Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK).....	48
3.2.1 Peran dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai fasilitator.....	48
3.2.2 Peran dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai Regulator.....	54
3.2.3 Peran dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai Katalisator.....	59
3.3 Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dengan pengusaha khususnya dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK).....	61
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	64
4.1 Pembahasan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK).....	66
4.1.1 Peran dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai fasilitator.....	67
4.1.2 Peran dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai Regulator.....	70
4.1.3 Peran dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai Katalisator.....	73
4.2 Pembahasan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dengan pengusaha khususnya dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK).....	75
BAB V PENUTUP.....	78

5.1 Kesimpulan.....	78
5.1.1 Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK).....	78
5.1.2 Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dengan pengusaha khususnya dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK).....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

